Izin Lapor, Bapak Kapolda Jatim:
Keadilan Dipertanyakan di Unit PPA Tulungagung



Komunitas Belajar Bareng Takalar Buka Pelatihan TMT Batch 4

ALMATU Pertanyakan Status Lahan Desa Digunakan Gedung Sekolah

MEDIA ONLINE & CETAK

Since 2009

Pendiri
IKMAL DAVID PERMANA (Alm)

SPJNEWS.id
INFORMASI AKTUAL, TERPERCAYA, DAN BERIMBANG

TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H | Website: spjnews.id | Email: spjnews.spj@gmail.com | Rp. 15.000



Revitalisasi 36 SD Negeri di Jombang Rp31,8 M Disorot

SPJNEWS, JOMBANG | Program revitalisasi 36 sekolah dasar negeri di Kabupaten Jombang dengan anggaran sekitar Rp31,8 miliar mulai mendapat sorotan, bukan hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga mekanisme keterlibatan konsultan dalam proyek tersebut.

Perhatian muncul setelah adanya pengakuan seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Jombang, Ahmad Jalalludin, yang sebelumnya menyatakan pernah mengenalkan personel konsultan kepada sekolah yang membutuhkan jasa tersebut.

Jalalludin membantah mengarahkan sekolah untuk menggunakan konsultan tertentu. Namun, ia mengakui pernah memperkenalkan personel konsultan kepada pihak sekolah yang tidak memiliki jaringan atau kontak konsultan. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas jabatan resminya.

● KE HALAMAN 11



ILUSTRASI: AI

Sekda Jabar Targetkan Zero ATS 2029

SPJNEWS, BANDUNG | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dan sektor pendidikan di kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS). Ia menargetkan Jawa Barat dapat mencapai kondisi Zero ATS atau nol anak tidak sekolah paling lambat pada 2029.

Herman menilai masih tingginya angka anak tidak sekolah menjadi persoalan serius di tengah usia kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai 81 tahun. Berdasarkan data Dapodik, jumlah ATS di Jawa Barat tercatat sekitar 508.000 anak. Sementara itu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 420.000 anak berusia 7–18 tahun yang tidak bersekolah.

● KE HALAMAN 11

Dugaan Bancakan Revitalisasi, LSM BUMI Pertanyakan Juknis Swakelola

SPJNEWS, GARUT | Pelaksanaan Program Revitalisasi Gedung Pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari tingkat PAUD hingga menengah atas, kembali mendapat sorotan tajam. Alih-alih berjalan optimal untuk memperbaiki fasilitas belajar-mengajar, program perbaikan sekolah ini disinyalir kuat dijadikan ajang "bancakan" oleh oknum -oknum tertentu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BUMI, Faizal, mengungkapkan bahwa praktik pemotongan dana oleh pihak yang mengaku sebagai "tim pengusung" sudah menjadi rahasia umum di lapangan. "Sudah menjadi rumor dan rahasia publik bahwa sampai turunnya program kegiatan revitalisasi tersebut, adanya dugaan potongan -potongan oleh tim yang dinamakan para pengusung," ujar Faizal saat dimintai keterangan, Rabu (23/9/26) lalu.

Menurut Faizal, para pemain atau tim pengusung ini menggunakan berbagai jalur untuk melancarkan kepentingan mereka. Ada yang bergerak langsung melalui kementerian, hingga memanfaatkan jalur partai politik dan anggota DPR RI. Akibat praktik tersebut, pembangunan fisik revitalisasi sekolah dari tingkat PAUD hingga menengah atas dinilai tidak maksimal dan jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

Yang terjadi hari ini dilapangan, dalam pembangunan revitalisasi ruang belajar itu dengan digunakannya mekanisme swakelola dalam pengerjaan proyek.

● KE HALAMAN 11



Dari Daerah untuk Dunia:

Perspektif HI dalam Komunikasi Publik Kemenag

Kesadaran itu mengajak saya melihat pekerjaan humas dengan sudut pandang yang lebih luas. Berita dan unggahan yang kita buat memang berangkat dari kegiatan di sekitar kita. Namun, perjalanan pesan tersebut dapat melampaui lingkungan tempat cerita itu bermula.

Apa hubungan unggahan kegiatan madrasah dengan hubungan internasional? Sekilas, keduanya terasa berjauhan. Humas madrasah mengabarkan aktivitas siswa, sementara hubungan internasional identik dengan pertemuan antarnegara, duta besar, dan meja perundingan.

Namun, coba bayangkan sebuah video siswa madrasah bergotong royong bersama warga berbeda agama. Video itu diunggah untuk masyarakat setempat, kemudian dibagikan ulang, diterjemahkan, dan ditonton oleh orang di negara lain. Bagi penonton tersebut, video itu dapat menjadi salah satu jendela untuk mengenal kehidupan beragama di Indonesia.

Di ruang digital, cerita lokal dapat memiliki pembaca global. Karena itu, perspektif Hubungan Internasional (HI) relevan bagi komunikasi publik Kementerian Agama, dari pusat hingga daerah, perguruan tinggi keagamaan, madrasah, dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Perspektif ini membantu humas melihat hubungan antara pesan, pembaca, dan dampaknya. Apa yang ingin kita sampaikan? Bagaimana orang dengan latar berbeda akan memahaminya? Gambaran tentang Indonesia seperti apa yang terbentuk dari cerita tersebut?

Cerita Sehari-hari Jadi Makna yang Lebih Luas

Dalam HI, ada konsep soft power, yakni kemampuan membangun daya tarik melalui nilai, budaya, dan keteladanan. Bagi humas Kemenag, konsep ini dapat dipahami melalui pengalaman sehari-hari yang layak diceritakan.

Kerja sama mahasiswa lintas negara di perguruan tinggi keagamaan, kepedulian siswa madrasah terhadap lingkungan, atau pendampingan penyuluh agama kepada masyarakat dapat memperlihatkan bagaimana nilai keagamaan hadir dalam kehidupan sosial.

Tentu, sebuah unggahan tidak otomatis menjadi diplomasi publik. Namun, cerita yang akurat dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat di luar Indonesia mengenal pengalaman kita.



OLEH: **Afissa Hanani Oktavia**

Di sinilah humas daerah memiliki peran. Pengalaman hidup berdampingan berlangsung di kampung, ruang kelas, kampus, dan lingkungan pelayanan masyarakat. Dari tempat-tempat itulah cerita yang dekat dengan manusia dapat ditemukan.

Misalnya, ketika memberitakan kegiatan lintas agama, humas dapat menggali bagaimana peserta bekerja bersama, persoalan apa yang mereka hadapi, dan manfaat apa yang dirasakan warga. Pembaca kemudian memperoleh gambaran kerukunan melalui tindakan nyata.

Daya tarik cerita tumbuh dari bukti. Klaim besar tentang toleransi akan lebih bermakna ketika disertai pengalaman orang-orang yang menjalaninya.

Satu Pesan Banyak Pembaca

Humas biasanya mengenal pembaca utamanya: siswa, orang tua, mahasiswa, atau masyarakat pengguna layanan. Akan tetapi, setelah dipublikasikan, informasi dapat dibaca oleh media, mitra lembaga, komunitas agama lain, hingga masyarakat luar negeri.

Perbedaan latar pembaca membuat konteks menjadi penting. Istilah yang akrab bagi kita belum tentu dipahami orang lain. Singkatan PTKIN, nama program, atau istilah keagamaan tertentu perlu diberi penjelasan singkat saat pertama kali disebut.

Kepekaan ini juga berlaku pada judul, foto, dan kutipan. Sebuah foto kegiatan dapat beredar tanpa keterangan lengkap. Potongan pernyataan dapat dibagikan tanpa paragraf yang menjelaskan maksudnya.

Sebelum mengunggah, humas dapat membiasakan satu pertanyaan: "Jika seseorang hanya melihat judul dan foto ini, apakah ia memperoleh gambaran yang tepat?"

Pertanyaan sederhana tersebut membantu kita menyusun pesan yang tetap jelas ketika berpindah dari satu ruang pembaca ke ruang lainnya.

Cermat Menyebut Hasil Kerja sama

Perspektif HI terasa lebih langsung ketika satuan kerja berinteraksi dengan pihak luar negeri. Pertemuan semacam ini dapat berlangsung di pusat, kampus, maupun madrasah.

Bayangkan sebuah perguruan tinggi keagamaan menerima kunjungan universitas asing untuk membahas kemungkinan pertukaran mahasiswa. Jika pembicaraan masih berupa penjajakan, judul "Dua Kampus Sepakati Pertukaran Mahasiswa" akan mendahului kenyataan.

Pilihan kata "membahas", "menjajaki", "menyepakati", "menandatangani", dan "melaksanakan" menunjukkan tahap yang berbeda. Ketepatannya penting karena berita dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, orang tua, dan lembaga mitra.

Hal serupa berlaku ketika madrasah menerima tamu internasional. Kunjungan belum tentu menghasilkan kemitraan. Ketertarikan belum tentu menjadi komitmen. Penandatanganan dokumen pun masih perlu diikuti pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan.

Karena itu, humas perlu mengonfirmasi hasil pertemuan kepada penanggung jawab kegiatan. Apa yang benar-benar dibahas? Apa yang sudah disepakati? Apa tindak lanjutnya?

Humas juga perlu menjelaskan tujuan kerja sama. Pertukaran mahasiswa, misalnya, dapat menjadi sarana memperluas pengalaman belajar dan meningkatkan kemampuan lintas budaya. Dengan menjelaskan manfaat yang ingin dicapai, berita menjadi lebih bermakna bagi pembaca.

Berita yang proporsional membantu lembaga menjaga kepercayaan sekaligus mencegah munculnya harapan yang belum memiliki kepastian.

Bahan liputan sering memuat banyak pernyataan. Tugas humas adalah memahami konteksnya sebelum memilih bagian yang akan dipublikasikan. Kalimat yang disampaikan untuk membuka pembicaraan dapat memiliki makna berbeda ketika dijadikan judul berita.

Dalam pertemuan kerja sama, misalnya, pimpinan madrasah menyampaikan kebutuhan peningkatan kemampuan bahasa asing bagi guru. Humas dapat mengangkat kebutuhan tersebut beserta peluang pengembangannya. ■ **RED**

IMEDIA ONLINE & CETAK SPJNEWS.id SINGKAT-PADAT-JELAS

Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers, oleh:

PT. SURYA GAMA ABADI
S.K. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AHU-A110341.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 1000000010662846
NIB: 0608260424496
REKENING BJB: 0162647253100 A.n PT. SURYA GAMA ABADI

Pembina : Muhammad Hudin, SPd
Moch. Fauzan Rachman, Se (Non Aktif)

Pendiri: Ikmal David Permana (Alm) - Ag Suhendra
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ag Suhendra
Wakil Cabang Pemimpin Perusahaan Jawa Timur: Asep Yumarwoko. St. MM
Redaktur Pelaksana: Kusmawan
Redaktur: Ajang Pendi
It/Admin : W. Setiawan
Konsultan Hukum : Herman. Sh, Asep Mulyana. Sh, Deny Kuswandy. Sh, Sayyid M Iqbal Rahman. Sh., M.h

DEWAN REDAKSI : Kusnandar, Budiyono, Herman. Sh, Ajang Pendi, Moch. Mansyur, H. Moch. Salifi Rachman, Ari Wibiksana, Se, Apip Saripudin, Sarief Hidayat. Se, Aris, Bang Ana

KAB. BANDUNG: Herman. Sh, Tonny Adam, Bangbang, M. Jajang Suryana, Nurhalim Ismail. Sh Bandung Barat : Herman. Sh

KOTA BANDUNG : H. Moch. Salifi Rachman, Nandar, Haris Nugraha, Donni, Asep Solihin, Muhadi Rohman.

PROPINSI JABAR: Iwan Hermawan, Dedi Setiadi, Herman, Sh

BIRO GARUT : Ugan Sugandi (Kabiro), Ajang Pendi, H. Iwan Setiawan, Pupu Abdul Latief, Tendi Juharman *(Biro Redaksi: Jl. Bratayudha-Galumpit Rt.02/26 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Tlp. 081394288233)*

BIRO BANDUNG TIMUR : Daud
BIRO CIAMIS-PANGANDARAN: Endang Koswara, S. Ip
BIRO SUKABUMI : Yoga Danis (Kabiro)
BIRO MAJALENGKA : Maman Sarman
BIRO CILEGON : Muslimin (Ka. Biro)
BIRO SERANG BANTEN : Wahyudin (Kabiro), Ade Supriyana
BIRO KAB LEBAK: Udas Suryana (Kabiro)
BIRO TANGERANG SELATAN : Iwan Sutisna
BIRO PROPINSI JAWA TIMUR: Asep Yumarwoko. St. Mm, (Kabiro) Moch. Hasan Musri, (Kabiro), Sari
BIRO MADIUN: Isnandar, Muji Hartono, Bambang, Puguh Yuhana
BIRO KAB. TULUNGAGUNG : Mualimin, (Kabiro)
BIRO KAB. MOJOKERTO: Syaiful Bakhri, (Kabiro)
BIRO KAB. NGANJUK : Alfan Saroni (Kabirio), Edi Yulianto Tri Prayitno
BIRO MADURA: Fendi Riyanto (Kabiro), Abdullah, S.si. (Kabiro Pamekasan)
BIRO KAB. PACITAN: Suprapto
BIRO KAB. GRESIK : Muhammad Hudin (Kabiro), Endah Lelyani, M. Tarsan, Muhammad Hariyanto, Abdul, Bang Doel
BIRO SIDOARJO : Sari
BIRO JOMBANG : Ratno Hadi (Kabiro), Diana Kholidah
BIRO PROPINSI JAWA TENGAH : Sugeng Riyanto (Kabiro)
BIRO KAB. WONOGIRI: Yayak Nurmanto (Kabiro)
BIRO KOTA MAKASSAR : Ir. Walinono Haddade (Kabiro)
BIRO SULUT : Howard Hendriek Marius
BIRO SULAWESI SELATAN: Drs. Sadikin. S (Kabiro), Jufri, Moch. Sulaiman, Nurdin. Se, Haruna Hambali. S.pd
BIRO KAB. GOWA : Abd Azis. Se (Kabiro), Riswanto. S.sos, Muh. Jafar, Safriah. S. Kom, Samsunar Alam
KOORDINATOR BIRO SULAWESI SELATAN: Haenumar Karaeng Muang
BIRO KAB.TAKALAR: Rahim. Dg Sua (Kabiro)
BIRO PALEMBANG: Hartoni (Kabiro)
BIRO PROVINSI ACEH : M. Chairullah (Kabiro)

REDAKSI/TATA USAHA:
Jl. Lamajang 2 Zypur Dayeuhkolot Kab. Bandung

PERWAKILAN: Kab. Bandung: Jl. St. Barat Banjaran No. 138 Banjaran Bandung 40377 Tlp. 08522139720 – 0895601616189
Email:redaksi@spjnews.id - **Website:**spjnews.id

MEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

Izin Lapor, Bapak Kapolda Jatim: Keadilan Dipertanyakan di Unit PPA Tulungagung

SPJNEWS, TULUNGAGUNG | Hukum sejatinya hadir untuk melindungi mereka yang lemah, bukan membiarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian. Namun, pertanyaan itulah yang kini mengemuka dari keluarga korban dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Menurut pengakuan keluarga, penanganan perkara tersebut telah berlangsung hampir dua tahun tanpa kejelasan yang memuaskan.

Di tengah gencarnya komitmen reformasi pelayanan kepolisian, penanganan kasus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulungagung ini justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan keluarga korban dan para pendampingnya.

Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya menyangkut lambatnya proses hukum. Keluarga korban juga mempertanyakan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya disebut dititipkan di lingkungan Polres Tulungagung, tetapi kini diklaim tidak diketahui keberadaannya.

Pertanyaan yang muncul sederhana, tetapi mendasar: di manakah keberadaan kendaraan tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab apabila benar barang itu tidak lagi diketahui keberadaannya, padahal berkaitan dengan kepentingan perkara?

Ironisnya, di tengah harapan untuk memperoleh kepastian hukum, ibu korban berinisial RBT mengaku kembali menerima surat panggilan pemeriksaan tertanggal 3 Oktober 2026.

Namun, menurut keterangannya, ketika memenuhi panggilan tersebut, ia tidak dimintai keterangan sebagaimana lazimnya pemeriksaan saksi. Sebaliknya, ia justru dipertemukan dengan ayah terduga pelaku untuk upaya mediasi.

"Saya kecewa. Kenapa saya yang terus dipanggil? Kenapa bukan pelaku atau keluarganya yang dimintai pertanggungjawaban? Saya sudah menyampaikan sejak awal bahwa kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan tidak ada negosiasi apa pun," ujar RBT, Minggu, 11 Oktober 2026 lalu.

Pernyataan tersebut memunculkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar prosedur administrasi. Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu keluarga, melainkan juga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Ketua LSM GMBI Distrik Tulungagung, Asep Yumarwoko, S.T., M.M., yang menerima kuasa untuk mendampingi keluarga korban, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, keluarga korban merasa dipertemukan dengan pihak keluarga terduga pelaku ketika mereka masih menunggu kepastian mengenai proses hukum yang berjalan.



"Kasus ini sudah hampir dua tahun berjalan. Korban dan keluarganya berharap ada kepastian hukum. Namun, yang terjadi justru pemanggilan terhadap ibu korban, sementara pihak keluarga terduga pelaku meminta mediasi. Masyarakat tentu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan perkara ini?" ujarnya.

Dalam negara hukum, keadilan tidak boleh sekadar menjadi slogan di baliho atau kalimat indah dalam pidato seremonial. Keadilan harus tercermin dalam tindakan nyata, keberanian mengambil keputusan, serta transparansi kepada masyarakat.

Kapolda Jawa Timur yang baru telah memperkenalkan empat pesan moral yang kuat, yakni jangan arogan, jangan berbohong, jangan menyalahgunakan kewenangan, dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

Keempat pesan tersebut bukan sekadar jargon komunikasi publik. Lebih dari itu, pesan-pesan tersebut merupakan tolok ukur moral bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas aparat di lapangan.

Karena itu, ketika keluarga korban mengaku belum memperoleh kepastian hukum setelah hampir dua tahun, publik berhak mempertanyakan apakah semangat yang terkandung dalam pesan-pesan tersebut benar-benar telah diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.

Pertanyaan ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, hal ini merupakan harapan agar institusi yang menjadi salah satu benteng pencari keadilan mampu menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada perlindungan korban dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berlarut-larut.

Kini, perhatian tertuju pada jajaran Polda Jawa Timur. Masyarakat menunggu jawaban yang tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, serta kepastian hukum yang dapat memulihkan kepercayaan publik.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut anak, waktu yang terbuang bukan sekadar hitungan bulan atau tahun. Ketidakpastian yang berkepanjangan dapat menambah beban psikologis korban dan keluarganya, sementara harapan untuk memperoleh keadilan terus menanti jawaban. ■ **Mualimin**

Sekda Takalar Soroti Integritas ASN

SPJNEWS, TAKALAR | Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP., M.A.P., M.I.Kom., meminta aparatur sipil negara menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik.

Pesan itu disampaikan Hasbi saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar.

Upacara berlangsung khidmat. Prosesi diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan doa. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kapolres Takalar, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Agama Takalar, Ketua DPRD Takalar, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Dalam amanatnya, Hasbi mengatakan upacara setiap tanggal 17 tidak semestinya dipandang sebagai agenda seremonial semata. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan aparatur sekaligus pengingat terhadap tanggung jawab sebagai abdi negara.

"Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bukan hanya seremonial, tetapi merupakan momentum pembinaan bagi Aparatur Pemerintah, TNI, Polri, PNS, PPPK, dan seluruh abdi negara," ujar Hasbi.

Ia meminta semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi diterjemahkan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Integritas, tanggung jawab, karya nyata, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, kata dia, harus menjadi bagian dari perilaku aparatur. "Semangat 17 Kemerdekaan RI harus tetap diingat setiap saat, dan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, karya nyata, integritas, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.



Hasbi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip manajemen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia menyebut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan harus berjalan secara terukur.

Menurut dia, kemampuan memimpin tidak hanya berlaku bagi pejabat yang memegang jabatan struktural. Setiap aparatur, kata Hasbi, setidaknya harus mampu mengelola dan memimpin dirinya sendiri serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. ■ **Rahim**

IMEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

Raih Predikat Sangat Baik, Pemkab Bandung Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik

SPJNEWS, KAB. BANDUNG | Pemerintah Kabupaten Bandung meraih predikat Sangat Baik dalam penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital.

Penghargaan tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan, diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Capaian ini sejalan dengan upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam mendorong pelayanan yang lebih efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung terlihat dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Layanan tersebut didukung aplikasi Bedas Digital Services (BDS), Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta pelayanan langsung melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Ketiga fasilitas itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pelayanan tatap muka di kantor dinas.

BDS Permudah Pengajuan Dokumen Kependudukan

Aplikasi Bedas Digital Services menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mempermudah pengajuan dokumen administrasi kependudukan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan berbagai layanan, mulai dari penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pembuatan atau perbaikan Kartu Keluarga (KK), hingga pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Pemanfaatan layanan digital diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan masyarakat. Sistem ini juga menjadi alternatif bagi warga yang tidak selalu dapat mendatangi kantor Disdukcapil secara langsung.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Tata Irawan mengatakan, penerapan pelayanan berbasis aplikasi turut mengubah pola pelayanan di kantor dinas. Menurut dia, berkurangnya aktivitas pelayanan tatap muka bukan berarti pelayanan kepada masyarakat mengalami penurunan. "Karena pelayanan sudah diarahkan melalui aplikasi, secara otomatis di kantor Disdukcapil tidak terlalu terlihat pelayanan langsung kepada masyarakat sepmen kependudukan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Disdukcapil Kabupaten Bandung, sebanyak 170 mesin ADM telah didistribusikan. Jumlah tersebut terdiri atas 160 mesin di desa dan 10 mesin di kelurahan.

Penyediaan ADM ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Fasilitas ini juga melengkapi layanan digital melalui BDS, khususnya dalam mendukung pencetakan dokumen yang dapat diproses melalui mesin tersebut.



erti sebelumnya. Di kantor, kami lebih banyak menangani pengajuan yang dikirimkan dari kecamatan dan desa. Jadi, kami tetap konsisten melayani masyarakat, hanya mekanismenya sekarang lebih banyak melalui aplikasi," kata Tata Irawan, Selasa (13/10/2026) lalu.

Ia menjelaskan, Disdukcapil tetap menangani pengajuan yang disampaikan melalui jaringan pelayanan kecamatan dan desa. Dengan demikian, perubahan mekanisme pelayanan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan koordinasi antartingkat pemerintahan.

Sebanyak 170 Mesin ADM Didistribusikan

Selain melalui aplikasi BDS, Pemkab Bandung memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Mesin layanan mandiri yang menyerupai anjungan tunai mandiri (ATM) tersebut dapat digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kombinasi layanan berbasis aplikasi, mesin ADM, dan jaringan pelayanan di tingkat kecamatan serta desa diharapkan dapat memberikan alternatif akses yang lebih luas bagi masyarakat.

MPP Tetap Layani Warga yang Membutuhkan Pendampingan

Meski pelayanan digital terus diperkuat, Disdukcapil Kabupaten Bandung tetap menyediakan pelayanan langsung melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Layanan tatap muka tersebut diperlukan bagi masyarakat yang mengalami kendala teknis, menghadapi persoalan persyaratan administrasi, atau membutuhkan penanganan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme reguler.

Keberadaan layanan langsung menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh bantuan ketika menghadapi hambatan dalam menggunakan layanan digital.

Melalui pembagian fungsi tersebut, pengajuan rutin dapat diarahkan melalui sistem digital, sedangkan persoalan yang memerlukan pemeriksaan atau pendampingan lebih lanjut tetap ditangani melalui jalur pelayanan yang sesuai.

Ketersediaan Blanko KTP-el Masih Menjadi Kendala

Di tengah penerapan berbagai inovasi pelayanan, ketersediaan blanko KTP-el masih menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Tata Irawan menjelaskan, pasokan blanko KTP-el berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Disdukcapil Kabupaten Bandung menerima alokasi sekitar 10.000 keping per bulan untuk didistribusikan ke 31 kecamatan.

Distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Dalam keterangannya, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih besar dapat memperoleh sekitar 50 keping blanko per hari, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk lebih sedikit memperoleh sekitar 20 keping per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran penerbitan KTP-el tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan dan kesiapan petugas di daerah, tetapi juga oleh ketersediaan blanko dari pemerintah pusat.

Karena itu, pengajuan melalui aplikasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh kendala pelayanan. Proses penerbitan dokumen tetap bergantung pada kelengkapan persyaratan dan ketersediaan blanko, terutama untuk KTP-el.

Warga Diimbau Mengurus Dokumen Sejak Dini

Untuk mengantisipasi kendala administrasi, Tata Irawan mengimbau masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan sebelum dokumen tersebut diperlukan dalam waktu mendesak.

Menurut dia, pengurusan lebih awal dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk melengkapi persyaratan dan mengantisipasi proses administrasi maupun keterbatasan ketersediaan blanko KTP-el.

"Pesan saya kepada masyarakat, urus administrasi kependudukan ketika belum sedang dibutuhkan secara mendesak. Jangan sampai baru diurus ketika dokumen diperlukan dalam waktu dekat. Ini demi kelancaran kita bersama. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dokumennya, dan kami di Disdukcapil juga bisa melayani dengan lebih baik," ujarnya.

Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas pelayanan digital yang tersedia serta memastikan kelengkapan persyaratan sebelum mengajukan permohonan. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi hambatan yang berpotensi muncul selama proses pengurusan dokumen.

Penghargaan Jadi Dorongan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan

Predikat Sangat Baik dalam penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026 menjadi capaian bagi Pemkab Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah daerah masih perlu memastikan bahwa penguatan digitalisasi diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Aspek tersebut mencakup kemudahan akses, kejelasan prosedur, kelancaran proses administrasi, serta penanganan kendala pelayanan.

Melalui pengembangan BDS, distribusi 170 mesin ADM, dan penyediaan layanan langsung di MPP, Pemkab Bandung berupaya memperluas pilihan akses pelayanan administrasi kependudukan. ■ **ADS/BR**

MEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

Bupati Bandung KDS Terus Bertahap Tangani Masalah Sampah Sesuai UU

SPJNEWS, KAB. BANDUNG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan sampah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menjajaki pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dengan target kapasitas hingga 450 ton per hari.



Langkah tersebut ditempuh di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, Kabupaten Bandung hingga kini belum memiliki tempat pemrosesan akhir yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, mengatakan pihaknya terus mengupayakan sejumlah langkah untuk menangani persoalan sampah secara bertahap. Selain menjajaki pengiriman sampah ke Legok Nangka, Pemkab Bandung berharap fasilitas pengolahan sampah di kawasan Cicukang segera terealisasi. "Untuk fasilitas di Cicukang, saat ini masih dalam proses melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kami berharap rencana tersebut bisa segera terealisasi sehingga dapat membantu penanganan sampah di Kabupaten Bandung," ujar Ruli, Senin,12/10/26 lalu.

Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan penambahan kapasitas pengangkutan dan fasilitas pengolahan. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Ruli mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan. Sebab, penumpukan sampah dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari gangguan kesehatan hingga banjir, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dampaknya bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi juga bisa memicu banjir dan mengganggu aktivitas ekonomi maupun pendidikan," katanya.

Selain itu, DLH Kabupaten Bandung mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan. Asap pembakaran berpotensi mencemari udara dan menimbulkan gangguan pernapasan. Pembakaran sampah di sekitar lahan atau kawasan hutan juga dapat memicu kebakaran.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, DLH Kabupaten Bandung terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, termasuk di lingkungan sekolah dan rumah sakit. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah.

Pemkab Bandung berharap upaya pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, penanganan sampah tidak hanya dilakukan setelah terjadi penumpukan, tetapi juga melalui upaya pencegahan sejak dari sumbernya.

Ruli menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

"Mari kita jaga lingkungan dari tumpukan sampah. Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. ■ **SPJ-09**

21 Pejabat Eselon II Tulungagung Dilantik, Struktur Baru Ditetapkan

SPJNEWS, TULUNGAGUNG | Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 800. 1.3.3/ 340/ 46.03/2026, tertanggal 7 Oktober 2026, dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin.

Keputusan ini bukan sekadar pergantian nama dan kursi jabatan. Ia merupakan bagian dari penataan birokrasi yang menuntut setiap pejabat menghadirkan kerja nyata, integritas, serta keberanian menerjemahkan kepentingan publik ke dalam kebijakan.

Berikut 21 pejabat yang ditetapkan:

- **Dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes. –** Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- **Wahid Masrur, S.Sos., M.M. –** Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- **Drs. Trangono Dibyo Harsono, M.M. –** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- **Drs. Suyanto, M.M. –** Kepala Dinas Perikanan.
- **Sudarmaji, S.Sos., M.Si. –** Kepala Dinas Pendidikan.
- **Soni Welly Ahmadi, S.S.T.P., M.M.** – Kepala Dinas Perhubungan.
- **Suroto, S.Sos., M.M. –** Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- **Robinson Parsaoran Nadeak, S.H., M.H**. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- **Muhammad Ardian Candra, S.S.T.P. –** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- **Dr. dr. Kasil Rahmat, M.M., M.R.S. –** Direktur RSUD dr. Iskak.
- **Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si. –** Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- **Iswahyudi, S.I.P., M.Si. –** Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- **Dra. Imro'atul Mufidah, M.Si.** – Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- **Galih Nusantara, S.S.T.P., M.M. –** Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- **Esti Purwanti, S.H., M.H. –** Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- **Erwin Novianto, S.T., M.T. –** Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- **Dwi Hari Subagyo, S.S.T.P., M.Si.** – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- **Anang Prastistianto, S.T., M.Si.** – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- **Agus Prijanto Utomo, S.E. –** Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.



- **Drs. Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si. –** Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- **Ahmad Mugiyono, S.S.T.P., M.M. –** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan ditetapkannya para pejabat tersebut, tanggung jawab birokrasi kini bertumpu pada kemampuan untuk membuktikan bahwa jabatan bukanlah sekadar kehormatan administratif, melainkan amanah yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang sibuk dengan jabatan, melainkan birokrasi yang membuat masyarakat merasakan hadirnya negara.

Penetapan dilakukan di Tulungagung pada 7 Oktober 2026 dan ditandatangani Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin.

■ **Mualimin**

TKD Berkurang Rp1 Triliun, KDS Tegaskan Program Guru Ngaji Tetap Berjalan



SPJNEWS, KAB. BANDUNG | Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau lebih akrab disapa KDS menghadiri agenda Sosialisasi Program Kerja 2025–2029 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bandung sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bandung pada Selasa pagi (06/10/2026) lalu.

Dalam suasana hangat penuh keakraban bersama para pensiunan PNS, KDS menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kekompakan para purna tugas yang tetap aktif dan produktif.

"Pertama dan yang paling utama, tentunya kita wajib bersyukur. Saya melihat para sesepuh-sesepuh, para senior, walaupun usianya sudah di atas 80 tahun tapi saya melihat para senior masih guyub, masih kompak. Ini menandakan bahwa kalau PWRI mana ada bakal pensiun," ujar KDS di hadapan para pengurus dan anggota PWRI.

Dalam kesempatan tersebut, KDS memberikan dukungan penuh terhadap rencana penataan organisasi dan pembentukan badan usaha berupa Koperasi PWRI Kabupaten Bandung periode 2025–2029 di bawah kepemimpinan Yudi Haryanto. Untuk menunjukkan komitmennya, KDS siap memberikan dukungan finansial awal secara langsung.

"Mengenai operasionalnya silakan tunjuk yang profesional, pengusahanya. Karena kelebihan koperasi itu dari, oleh, untuk anggota. Pak Yudi, kalau nanti sudah berdiri Koperasi PWRI Kabupaten Bandung, diresmikan, modal usahanya saya langsung nyimpan simpanan awal Rp100 juta khusus untuk ini. Tapi jalankan! Untuk pasarnya enggak usah khawatir," tegasnya.

Selain membahas pemberdayaan pensiunan, KDS juga membeberkan dinamika tantangan anggaran daerah yang sedang dihadapi Kabupaten Bandung akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun dari pemerintah pusat. "Tapi mohon maaf belum bisa maksimal, karena TKD kita berkurang Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, TKD kita jadi Rp2,6 triliun. Sementara gaji karyawan saja sudah Rp2,7 triliun. Nah, sehingga kondisi hari ini memang untung masih ada program-program efisiensi," ungkapnya.

Meski keuangan daerah mengalami efisiensi ketat, KDS memastikan program-program prioritas keumatan dan karakter masyarakat tidak akan dipangkas.

"Terus yang kedua, guru ngaji Rp109 miliar per tahun. Walaupun TKD berkurang tapi saya janji ingin memuliakan ulama, tetap program guru ngaji mah saya berikan. Kenapa? Karena yang membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita tuh guru ngaji," jelas KDS. ■ **SPJ-09**

:: Angka Anak Tidak Sekolah di Jawa Barat Turun 21,46 Persen

Kadisdik Apresiasi Kolaborasi Lintas Sektor

SPJNEWS, BANDUNG | Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mencatat kemajuan signifikan dalam upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Hingga awal Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat berhasil ditekan sebanyak 138.989 anak atau turun 21,46 persen. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penanganan ATS.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama berbagai lembaga dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Purwanto seusai memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/10/2026) lalu.

"Hari ini kita mengadakan rakor untuk akselerasi penurunan anak tidak sekolah bersama BBPMP, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kabag Kesra, dan lintas sektor. Kita bersyukur karena target yang ditetapkan pada 2025 hingga hari ini telah terlampaui," ujarnya.

Berdasarkan data pada dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 138.989 anak atau sebesar 21,46 persen.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Komalasari, turut mengonfirmasi capaian tersebut. Ia menjelaskan, dari jumlah awal yang mencapai sekitar 600 ribu anak, saat ini total ATS di Jawa Barat tercatat sebanyak 508.615 anak. Mereka tersebar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Sejumlah daerah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam menekan angka ATS. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan tertinggi sebesar 56 persen.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Ciamis dengan penurunan 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.

Purwanto menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Kementerian Agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, BBPMP, serta berbagai pihak lainnya.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan penanganan anak yang belum mengakses pendidikan.

"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," tegasnya.

Ke depan, upaya percepatan penurunan ATS akan terus diperkuat melalui koordinasi dan kerja sama



lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan target yang telah diinstruksikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, yakni Zero ATS atau nol anak tidak sekolah pada 2029.

■ **SPJ-06**

|MEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

Disdik Jabar Dorong Satuan Pendidikan Pahami Keterbukaan Informasi Publik

SPJNEWS, MAJALENGKA| Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) melalui Bidang Kehumasan memperkuat kapasitas kehumasan dan pengelolaan informasi publik bagi tim Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IX, Selasa (13/10/2026) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMKN 1 Majalengka ini bertujuan meningkatkan pemahaman satuan pendidikan mengenai implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengelolaan dokumen, pelayanan permohonan informasi, serta penyampaian informasi melalui media komunikasi publik.

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok menegaskan, keterbukaan informasi publik tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi hukum agar badan publik mampu memahami hak dan kewajibannya secara tepat. Menurutnya, satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta merupakan bagian dari badan publik yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Inti dari keterbukaan informasi publik adalah literasi hukum. Kita belajar bersama agar memahami aturan sehingga dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan terhindar dari persoalan hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu badan publik yang banyak menghadapi permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Barat. Salah satu informasi yang kerap dimohonkan masyarakat berkaitan dengan dokumen pengelolaan keuangan, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga laporan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, Husni mengingatkan satuan pendidikan agar memahami klasifikasi informasi dan prosedur pelayanan permohonan informasi. Pengelolaan anggaran



yang transparan dan akuntabel perlu diiringi kesiapan dalam memberikan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. "Kalau pengelolaannya bersih, tidak perlu risi. Anggaran yang dikelola badan publik berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik," tegasnya.

Selain mendorong transparansi, Husni juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan melalui pemahaman hukum. "Dengan memahami regulasi dan menjalankan prosedur secara benar, satuan pendidikan dapat meminimalkan potensi sengketa informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendidikan," ungkapnya.

Hadirkan Konten Media Sosial yang Informatif

Selain penguatan literasi hukum, kegiatan ini juga membahas peran strategis Humas dalam menyampaikan informasi pendidikan melalui media sosial.

Koordinator Kehumasan Disdik Jabar, Dewi Nuraini pun memberikan pengarahan terkait pengelolaan konten media sosial satuan pendidikan agar informasi yang dipublikasikan lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ■ **SPJ-12**

Pemkot Siapkan Pekerja Migran Terampil lewat Penguatan Pendidikan Vokasi

SPJNEWS, BANDUNG | Pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Upaya ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani di Pendopo Kota Bandung, Sabtu, 10 Oktober 2026 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penyiapan pekerja migran terampil melalui keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, dan lembaga pendidikan lainnya.

Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan industri di luar negeri.

Farhan juga menyebut pentingnya upaya menyiapkan calon pekerja migran dari berbagai latar belakang, termasuk lulusan pendidikan vokasi dan masyarakat dari keluarga berpendapatan rendah. Langkah ini dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Bandung.

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara masih membuka peluang bagi pekerja migran Indonesia. Bidang yang membutuhkan tenaga kerja antara lain pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), manufaktur, dan perhotelan (hospitality).

Negara tujuan yang menjadi peluang penempatan di antaranya



Jepang, Korea Selatan, Jerman, serta sejumlah negara Eropa lainnya.

Ia menjelaskan, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Penyiapan kompetensi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan kemampuan calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan di negara tujuan.

Selain peningkatan keterampilan, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian. Penempatan melalui prosedur resmi diperlukan agar pekerja memperoleh perlindungan dan akses penanganan apabila menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.

Dalam diskusi tersebut, dibahas juga pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan penempatan ke luar negeri, serta kendala persyaratan jaminan sosial yang dapat memengaruhi keikutsertaan calon peserta dalam program pelatihan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim BP3MI Jawa Barat akan berkoordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penyiapan calon pekerja migran terampil, pemanfaatan jejaring pendidikan vokasi, serta perluasan akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri. ■ **SPJ-08**

Dana Kemitraan Paguyuban Media Balerejo Dipertanyakan

SPJNEWS, MADIUN | Kemitraan media di wilayah Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, menjadi perhatian Paguyuban Media JMM. Persoalan yang dipertanyakan bukan total dana kemitraan yang dihimpun, melainkan kekurangan pembayaran kepada JMM yang hingga kini disebut belum terealisasi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat 18 desa di wilayah Kecamatan Balerejo yang masing-masing memberikan iuran kemitraan media sebesar Rp1 juta. Dengan demikian, total iuran yang dihimpun dari 18 desa tersebut mencapai Rp18 juta

Dana tersebut kemudian diperuntukkan bagi enam paguyuban media, salah satunya Paguyuban Media JMM.

Untuk JMM, nilai kemitraan yang menjadi bagiannya disebut sebesar Rp3 juta. Namun, hingga saat ini JMM baru menerima Rp1 juta, sehingga masih terdapat kekurangan Rp2 juta.

Kekurangan tersebut yang kini dipertanyakan JMM.

Sebelumnya, terkait kekurangan pembayaran itu, Kepala Desa Jerukgulung sempat menyampaikan janji transfer melalui percakapan WhatsApp pada 14 September 2026.

Dalam percakapan tersebut, Kepala Desa Jerukgulung menyampaikan: "sek repot aku Jumat cantik TF wae"

Pernyataan tersebut dipahami sebagai janji bahwa kekurangan pembayaran akan ditransfer pada hari Jumat.

Namun, menurut pihak JMM, hingga waktu yang dijanjikan, transfer sebesar Rp2 juta tersebut belum diterima.

Pertanyaan mengenai kepastian transfer kemudian kembali disampaikan melalui WhatsApp pada 21 September 2026 lalu. Pesan disebut telah terkirim, tetapi hingga berita ini disusun belum memperoleh respons. ■ **Puguh**



ALMATU Pertanyakan Status Lahan Desa Digunakan Gedung Sekolah

SPJNEWS, GARUT | Aliansi Masyarakat Bersatu (Almatu) mendesak kepastian hukum terkait status lahan desa yang selama ini digunakan sebagai lokasi gedung sekolah di Kabupaten Garut. Desakan tersebut disuarakan dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bidang Hukum serta Inspektorat Kabupaten Garut.



Audiensi berlangsung di ruang rapat Asisten Daerah (Asda) pada Kamis (8/10/2026) pagi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai narasumber Almatu, kepada spjnews.id Budi mengungkapkan, bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan legal formal dari Disdik Kabupaten Garut terkait aset tanah milik desa yang dipakai untuk fasilitas pendidikan, namun belum memiliki payung hukum yang jelas secara administrasi. "Kami mempertanyakan, apakah lahan tersebut sistemnya disewa atau ditukar guling ? Sementara seiring berjalannya waktu, pihak desa juga dituntut untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Desa, selain dari pada itu masih banyak Desa yang belum mendapat lahan guna KDMP, ujar Budi saat diwawancarai usai audiensi.

Potensi masalah bantuan revitalisasi, selain persoalan administrasi desa, Almatu juga menyoroti potensi kendala hukum dalam program bantuan revitalisasi (revit) sekolah. Menurut Budi, salah satu syarat mutlak penerimaan bantuan revitalisasi adalah kejelasan status kepemilikan lahan.

Ia khawatir, jika status tanah sekolah masih kabur, hal tersebut justru akan menjadi bom waktu dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. "Persoalan ini belum kunjung terselesaikan hingga sekarang, makanya hari ini kami pertanyakan secara tegas agar ada langkah konkret," tambahnya.

Alhasil, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyatakan akan segera mengambil langkah strategis. Disdik berencana akan berkoordinasi langsung dengan Bupati Garut untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Sebagai langkah awal, Pemkab Garut akan membentuk tim khusus guna melakukan inventarisasi menyeluruh. Tim ini bertugas mendata sekolah-sekolah mana saja di Kabupaten Garut yang masih menggunakan lahan milik desa, sehingga ke depannya dapat dicarikan solusi hukum yang jelas dan berkeadilan bagi kedua belah pihak, tutup Budi. ■ **Ajang Pendi**

Dwi Hari Subagyo Dipindah ke Damkar, Mutasi Pejabat Disorot

SPJNEWS, TULUNGAGUNG | Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menjadi perhatian. Dwi Hari Subagyo, S.STP., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Perpindahan tersebut menjadi sorotan karena nama Dwi Hari Subagyo sebelumnya muncul dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Dalam perkara tersebut, KPK memeriksa Dwi Hari Subagyo sebagai saksi. Pemeriksaan antara lain berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Gatut Sunu Wibowo yang diduga melibatkan Kepala BPKAD. Namun, pemeriksaan oleh KPK sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan informasi yang tersedia, Dwi Hari Subagyo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Kini, setelah dipindahkan dari jabatan Kepala BPKAD ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar dan pertimbangan mutasi tersebut.

Apakah perpindahan itu merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran birokrasi, hasil evaluasi atau uji kompetensi, atau terdapat pertimbangan administratif lainnya?

Pertanyaan tersebut penting ditempatkan dalam konteks transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Mutasi pejabat merupakan kewenangan pemerintah daerah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip manajemen aparatur sipil negara.

Karena itu, penjelasan mengenai dasar serta pertimbangan mutasi dapat menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. ■ **Mualimin**



MEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

Kooperatif Hadiri Panggilan Polres Tuban, Pihak Terlapor Travel MCI Siapkan Laporan Balik UU ITE

SPJNEWS, TUBAN | Pihak terlapor dalam dugaan kasus investasi travel umrah Mutiara Cinta Imani (MCI) Tuban, Ibu Yasmin, secara kooperatif mendatangi Mapolres Tuban pada Kamis (09/10/2026). Didampingi Kuasa Hukumnya, Nur Insyani, S.H., kedatangan tersebut bertujuan untuk memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Tuban guna memberikan klarifikasi resmi.

Langkah ini diambil sekaligus untuk meluruskan berbagai tuduhan sepihak serta pemberitaan media online yang dinilai tidak berimbang dan merugikan nama baik kliennya.



Bantah Tuduhan dan Sampaikan Fakta Hukum

Kuasa Hukum Ibu Yasin, Nur Insyani, S.H., menegaskan bahwa kehadiran kliennya merupakan bentuk kepatuhan hukum dan wujud itikad baik untuk membuka fakta sebenarnya di hadapan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Tuban.

"Klien kami hadir secara kooperatif memenuhi panggilan klarifikasi dari kepolisian. Kami telah menyampaikan seluruh keterangan dan fakta hukum yang sebenarnya untuk membantah tuduhan dugaan investasi bermasalah tersebut. Tuduhan yang dialamatkan kepada klien kami tidak benar dan sangat menyesatkan," ujar Nur Insyani, S.H. di Mapolres Tuban.

Selain itu, pihak terlapor juga menyampaikan rincian poin terkait penyelesaian kewajiban keuangan beberapa pihak terkait:

Sdr Lilis: Menurut Sdr Y, yang bersangkutan masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 30,5 juta.

Permasalahan Utang dengan Karmi: Dianggap sudah tidak ada masalah karena telah dikembalikan sebesar Rp 20 juta, serta telah membiayai ibadah umrah Karmi beserta keluarganya.

Soroti Berita Sepihak dan Layangkan Laporan Balik UU ITE

Selain memberikan klarifikasi atas aduan pelapor, tim kuasa hukum juga menegaskan bakal mengambil langkah hukum tegas berupa Laporan Balik ke Polres Tuban terkait dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pihak terlapor menyoroti publikasi pemberitaan media online tertanggal 20 September 2026 yang dinilai tidak komparatif dan menyudutkan tanpa mengedepankan asas keberimbangan berita (cover both sides). Narasi sepihak tersebut dianggap telah merusak reputasi, mencemarkan nama baik, serta membunuh karakter (character assassination) kliennya.

"Pemberitaan yang tidak komparatif tersebut sangat merugikan nama baik serta keberlangsungan usaha klien kami. Oleh karena itu, selain memberikan klarifikasi kepada penyidik, kami mengambil tindakan tegas dengan melaporkan balik pihak-pihak terkait atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE," tegas Nur Insyani.

Imbauan Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum mengimbau seluruh pihak, termasuk media massa dan masyarakat, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tuban serta mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Semua pihak diminta tidak lagi menyebarkan opini liar maupun narasi yang belum terbukti kebenarannya secara hukum. ■ **Suwandi**

KDS: Mulai Januari 2027, 7.550 PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi Penuh Waktu

SPJNEWS, KAB. BANDUNG | Kabar bahagia datang bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) menyampaikan kabar menggembirakan tersebut melalui akun media sosial pribadinya, Sabtu (19/9/2026) lalu.

Sebanyak 7.550 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung direncanakan segera beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu, mulai Januari 2027.

"Alhamdulillah, kabar bahagia itu makin nyata!" begitu pembuka kalimat yang disampaikan KDS, disambut antusiasme luas dari para pegawai maupun masyarakat.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyatakan melalui siaran resmi Kementerian Keuangan RI, pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan agar mulai Januari 2027 PPPK paruh waktu di daerah resmi beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 31,1 triliun untuk mendukung kebijakan peralihan P3K Paruh Waktu menjadi P3K Penuh Waktu tersebut.

Persoalan status PPPK Paruh Waktu sebelumnya telah menjadi salah satu hal yang diperjuangkan KDS bersama APKASI.

Saat melantik 7.550 PPPK paruh waktu Kabupaten Bandung pada akhir 2025, ia telah menyampaikan bahwa proses perjuangan untuk perubahan status tersebut belum selesai dan terus dilakukannya.

"Saya menyampaikan saat itu, perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar status Bapak dan Ibu bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu," ungkap KDS.

Untuk itu, KDS yang juga menjabat Ketua Harian APKASI itu meminta para kepala dinas dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung turut menyampaikan informasi tersebut kepada para PPPK Paruh Waktu di lingkungan masing-masing.

Di sisi lain, Bupati KDS mengingatkan para PPPK agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab apabila nantinya perubahan status tersebut telah resmi berlaku.

Ia meminta para pegawai tidak menganggap perubahan status sebagai alasan untuk mengurangi kinerja maupun kepedulian terhadap pemerintah daerah. "Saya juga mengingatkan, nanti setelah menjadi penuh waktu agar lebih bertanggung jawab dan peduli kepada pemerintah daerah. Jangan sampai seenaknya sendiri," katanya.



Bupati KDS berharap para PPPK terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. "Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras bapak dan ibu sekalian selama ini. Mari terus tingkatkan kinerja untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas," tuturnya. ■ **SPJNEWS-04**

Perjuangan Panjang Berbuah Manis, NPCI Kab. Garut Siap Berlaga di Peparda 2026

SPJNEWS, GARUT | Berkat kerja keras, perjuangan, serta kesabaran yang luar biasa dari para pengurus, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Garut akhirnya dipastikan bisa mengikuti ajang Pekan Paralorda (Peparda) 2026.



SEBAGAI bentuk kesiapan, NPCI Kabupaten Garut menggelar Apel Siaga II yang berlangsung khidmat di SOR Silat Ciateul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Asep Mulyana, bersama Ketua Umum NPCI Provinsi Jawa Barat, Andi.

Dalam sambutannya, Kadispora Asep Mulyana menyambut gembira kepastian keikutsertaan para atlet penyandang disabilitas ini. Ia memberikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh kepada para atlet yang dikenal pantang menyerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sendiri telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 200 juta guna mendukung partisipasi kontingen ini di ajang Peparda. "Saya tidak terlalu banyak berharap, semoga saja pulang ke Garut membawa kebahagiaan. Tetap semangat dan selamat berjuang," ujar Asep di hadapan para atlet dan pengurus.

Suasana apel mendadak menjadi haru ketika Asep Mulyana tak kuasa menahan air matanya.

Air mata kelegaan tersebut tumpah saat ia menyaksikan langsung bagaimana liku-liku perjuangan pengurus dan atlet NPCI Garut yang gigih memperjuangkan hak mereka hingga akhirnya bisa tampil di Peparda 2026.

"NPCI kudu wanian! NPCI wanieun!" NPCI wanieun! NPCI wanieun! Garut Hebat! seru Andi membakar motivasi kontingen.

Sementara itu, Sekretaris Umum NPCI Provinsi Jawa Barat, Andi, membakar semangat para atlet yang hadir melalui orasi penuh gelora. Dengan mengusung semangat lokal, ia menyerukan yel-yel penyemangat bagi para pejuang olahraga disabilitas tersebut.

"NPCI kudu wanian! NPCI wanieun!" NPCI wanieun! NPCI wanieun! Garut Hebat! seru Andi membakar motivasi kontingen.

Ia menegaskan agar para atlet harus berani tampil percaya diri di ajang Peparda nanti, serta terus berlatih dengan mental pantang menyerah demi mengharumkan nama Kabupaten Garut.

Dengan digelarnya Apel Siaga II ini, Kontingen NPCI Kabupaten Garut kini memusatkan fokus penuh untuk menghadapi perhelatan akbar Peparda 2026 yang dijadwalkan bergulir pada 22 November mendatang. ■ **Ajang Pendi**

Komunitas Belajar Bareng Takalar Buka Pelatihan TMT Batch 4

SPJNEWS, TAKALAR | Komunitas Belajar Bareng Takalar resmi membuka program Tailor Made Training (TMT) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch 4 dengan program pelatihan Pembuatan Craft dengan Teknik Rajut, Senin (12/10/2026) lalu.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar sebagai upaya meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang ekonomi kreatif.

Pembukaan pelatihan berlangsung di Basecamp Komunitas Belajar Bareng Takalar, Jalan Badaming Dg. Rani, Kabupaten Takalar.

Kegiatan ini disambut antusias dan dihadiri sejumlah pembina serta praktisi ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pembina Komunitas Belajar Bareng Takalar, Farniati Fattah; Kepala Bidang Humas Dinas Infokom Takalar sekaligus Pembina Ekraf PanrannuangTa Takalar, Andi Gunawan; serta praktisi kerajinan rajut sekaligus pemilik MM Craft, Nurwahidah, yang bertindak sebagai instruktur pelatihan.

Pelatihan TMT Batch 4 ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi, khususnya teknik rajut. Keterampilan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk kreatif yang dapat bersaing di pasar, terutama pada sektor fesyen dan suvenir.

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan pendampingan secara bertahap, mulai dari pengenalan teknik dasar merajut hingga praktik pembuatan produk jadi yang memiliki nilai jual.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dalam delapan kali pertemuan dengan materi yang disusun secara berjenjang.

Melalui program yang didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan digagas oleh Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Komunitas Belajar Bareng Takalar bersama Ekraf PanrannuangTa berharap pelatihan ini dapat membuka peluang lahirnya wirausaha kreatif baru dari Kabupaten Takalar yang mandiri dan berdaya saing.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Komunitas Belajar Bareng Takalar untuk memperluas ruang pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga, komunitas ini juga merencanakan pembinaan bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, melalui pengembangan pendidikan, keterampilan, ekonomi kreatif, dan bidang digital.



Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Komunitas Belajar Bareng Takalar berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, menciptakan produk kreatif bernilai ekonomi, serta memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. ■ **Rahim**

MEDIA ONLINE & CETAK
SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS
TAHUN XIII | EDISI-133 | OKTOBER-NOVEMBER 2026 - 1448 H

GMBI Distrik Gresik Salurkan Bantuan Air Bersih

SPJNEWS, GRESIK | Memasuki puncak kemarau panjang tahun 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik mengalami krisis air bersih. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Gresik bersama dengan Media SPJNEWS.ID bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di lokasi Dusun Gumining, Desa Tambakrejo kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik, Minggu (11/10/2026) lalu.



Penyaluran bantuan dipusatkan di wilayah yang waduk dan sumur warganya telah mengering. Sebanyak ribuan liter air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki dan langsung diterima antusias oleh warga.

Ketua LSM GMBI Distrik Gresik, Muhammad Hudin,S.Pd, selaku pemberi bantuan mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap penderitaan masyarakat.

Bakti sosial adalah wujud nyata dari slogan LSM GMBI : GMBI Sampai Mati, Bela Rakyat . Kami tidak bisa diam melihat warga kesulitan air. Air adalah kebutuhan paling dasar. Hari ini kami bersinergi bersama rekan-rekan media SPJNEWS.ID, dan JAWAPOSNUSANTARA.COM untuk memastikan warga tetap bisa mendapatkan air bersih yang layak," tegas Muhammad Hudin di lokasi penyaluran.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan siap menyalurkan bantuan tahap selanjutnya jika kemarau masih berlanjut. Kegiatan penyaluran air bersih ini berjalan lancar dan penuh keakraban.

"Ketua LSM GMBI Distrik Gresik menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan insan pers dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan lainnya," jelas Ketua LSM GMBI

Sementara itu, warga setempat menyambut baik bantuan tersebut. Ketua RT Rudi santoso menerima bantuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan air bersih . "Alhamdulillah, semoga bantuan ini sangat membantu warga kami . Karena hampir dua bulan sumur kami kering, untuk mandi dan masak saja susah. Terima kasih untuk ketua GMBI dan teman-teman media yang peduli sama kami," ujar ketua RT 05A Rudi santoso .

Hal senada disampaikan oleh seorang warga berinisial HD , Menurutnya, bantuan air bersih ini sangat berarti di tengah sulitnya masyarakat untuk mendapatkan air bersih .

Kalau beli air satu tangki harganya mahal, mencapai Rp 250 ribu . Dengan adanya bantuan gratis ini, beban kami sangat terbantu. Semoga berkah untuk semua," kata warga .

Hadi yang merupakan tokoh warga lainnya, berharap agar kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi pihak lain.

"Kami berharap pemerintah daerah juga lebih memperhatikan kondisi kami saat kemarau seperti ini. Apa yang dilakukan GMBI bersama media ini luar biasa, langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil," pungkas Hadi. ■ **Suwandi**

Revitalisasi 36 SD Negeri di Jombang...

< DARI HALAMAN 1

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang kemudian menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Sebab, dalam penelusuran lapangan, muncul nama konsultan berinisial R yang disebut atau tercatat terlibat pada proyek revitalisasi SDN Pucangsimo 2, Kecamatan Perak, dan SDN Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Jombang.

Namun demikian, belum terdapat bukti independen yang dapat memastikan bahwa konsultan R memiliki hubungan dengan konsultan yang pernah diperkenalkan oleh pejabat tersebut.

Artinya, keterkaitan antara keduanya belum dapat disimpulkan sebagai sebuah fakta.

Dari Warung Kopi ke Pertanyaan Publik

Informasi mengenai dugaan adanya konsultan tertentu yang memperoleh akses melalui jaringan tertentu juga beredar di kalangan konsultan dan kontraktor.

Salah satu sumber menyebut adanya konsultan berinisial AB yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan tertentu.

Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh dokumen atau bukti independen yang dapat memastikan keterlibatan AB dalam pengaturan proyek revitalisasi sekolah. Keterangan tersebut masih sebatas informasi dari sumber dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.



Justru di titik inilah kerja jurnalistik diperlukan: memisahkan antara cerita, dugaan, dan fakta yang dapat diverifikasi.

Pengenalan Konsultan Jadi Persoalan

Persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata mengenai apakah seorang pejabat pernah mengenalkan konsultan.

Yang lebih penting adalah konteks hubungan antara pejabat, sekolah, konsultan, dan proyek yang menggunakan anggaran negara.

Sekolah penerima program berada dalam ekosistem Dinas Pendidikan. Karena itu, pengenalan penyedia jasa oleh seseorang yang berada di lingkungan dinas berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi pilihan sekolah, meskipun pengenalan tersebut tidak serta-merta berarti terjadi pelanggaran. ■ **Ratno**

Sekda Jabar Targetkan Zero...

<< DARI HALAMAN 1

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Jika tidak ditangani secara optimal, banyaknya anak yang tidak mengakses pendidikan berpotensi menghambat pemanfaatan momentum bonus demografi untuk mendorong kemajuan daerah. Untuk mendukung percepatan penanganan ATS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pembiayaan dapat ditopang melalui dana pemerintah pusat, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ■ **Red**

Dugaan Bancakan Revitalisasi...

<< DARI HALAMAN 1

Ketua DPP LSM Bumi Faizal melontarkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan transparansi di balik pelaksanaan sistem swakelola ini. Ia mempertanyakan substansi dan materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis (Bintek) yang diselenggarakan oleh pihak instansi pendidikan kepada para penerima atau pelaksana di tingkat satuan pendidikan. "Yang jadi pertanyaan besar, dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme swakelola tersebut, bimbingan teknis yang diadakan oleh pihak instansi pendidikan itu seperti apa?" tegasnya.

Lebih lanjut, LSM BUMI menilai praktik di lapangan saat ini sudah tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan swakelola tersebut diduga kuat menabrak ketentuan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara jelas telah mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan secara swakelola.

Dengan adanya temuan dan rumor yang menyesatkan ini, LSM BUMI mendesak pihak instansi terkait, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam demi menyelamatkan mutu infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Namun, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sudah beberapa kali di hubungi tim spjnews belum ada tanggapan lebih lanjut terkait dugaan pemotongan anggaran dan mekanisme swakelola revitalisasi secara aturan yang berlaku. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021. ■ **A Pendi**

RSUD Kota Madiun Hadir di Car Free Day, Layani Edukasi dan Pemeriksaan Status Gizi

SPJNEWS, MADIUN | RSUD Kota Madiun kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di sepanjang jalan Pahlawan yang digelar pada Minggu, 4 Oktober 2026 dimulai pukul 06.00 - 09.00 WIB. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya RSUD Kota Madiun untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dan status gizi.



Pada kegiatan CFD kali ini, RSUD Kota Madiun membuka layanan berupa edukasi kesehatan dan pemeriksaan status gizi bagi masyarakat yang hadir. Pelayanan dilaksanakan secara langsung oleh tenaga kesehatan RSUD Kota Madiun dengan memberikan informasi sekaligus pemeriksaan sederhana terkait kondisi status gizi.

Masyarakat yang datang dapat berkonsultasi mengenai kondisi gizi serta memperoleh edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Pemeriksaan status gizi diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pada stan CFD sebagai Kepala Pelayanan RSUD Kota Madiun, dr. Hana Listiana, dokter umum, mengatakan kehadiran RSUD Kota Madiun di CFD merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami hadir dan berpartisipasi aktif setiap pekan pada kegiatan CFD, untuk pekan ini kita jadwalkan memberikan edukasi dan pemeriksaan status gizi sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Pemeriksaan status gizi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kondisi tubuhnya dan dapat melakukan langkah pencegahan maupun perbaikan sejak dini," ujar dr. Hana Listiana.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika seseorang sudah mengalami sakit. Edukasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan bagian penting dari upaya promotif dan preventif.

Sementara itu, Kepala Instalasi Gizi RSUD Kota Madiun, Kukuh Kristiani, S.Gz. Dietisien, menjelaskan bahwa status gizi merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan.

"Status gizi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tubuh seseorang. Karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak hanya kekurangan gizi, kelebihan berat badan juga perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan," jelas Kukuh Kristiani.

Melalui edukasi yang diberikan dalam kegiatan CFD, masyarakat diharapkan semakin memahami prinsip gizi seimbang, termasuk memperhatikan variasi makanan, kecukupan asupan, aktivitas fisik, serta pola hidup sehat.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang mengikuti aktivitas Car Free Day. Selain berolahraga dan menikmati suasana CFD, warga juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi serta melakukan pemeriksaan status gizi.

Kehadiran RSUD Kota Madiun dalam kegiatan CFD sekaligus menjadi sarana komunikasi langsung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dapat terus meningkat.

Melalui kegiatan edukasi dan pemeriksaan status gizi secara rutin, RSUD Kota Madiun berkomitmen mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat, sadar gizi, dan aktif melakukan upaya pencegahan penyakit sejak dini. ■ **Puguh**

:: Pecah Penuh Kegembiraan!

Karnaval Desa Bulu Rejo Benjeng Gresik Berlangsung Meriah

SPJNEWS, GRESIK | Pesta Rakyat Karnaval Desa Bulu Rejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, berlangsung sangat meriah dan penuh warna, Minggu (11/10/2026) lalu.

Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Raya Bulu rejo. Benjeng.(melintasi depan pasar tradisional bulurejo, depan Kantor Kecamatan Benjeng dan finish di lapangan Radesblue Desa bulu rejo) untuk menyaksikan pawai budaya tahunan terbesar di Benjeng tersebut.

Acara yang menjadi puncak perayaan Hari Jadi Desa ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Bulu Rejo, Imam Sofwan,S.Sos. Dengan mengenakan pakaian adat, Kades Imam Sofwan berjalan di barisan terdepan menyapa warganya.

Iringan musik DJ menggelegar , Warga masyarakat Desa Bulu rejo melakukan perfome, dan ada yang berjoget santai namun asik. Hal ini menjadi daya tarik tontonan gratis bagi warga lain seputar kecamatan Benjeng.

Bahkan ada rombongan dari wilayah Kecamatan Cerme yang rela meluangkan waktu nya untuk menikmati karnaval Desa bulu rejo kecamatan Benjeng.

Tampak hadir jajaran tamu undangan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Benjeng yang turut mengawal jalannya karnaval hingga selesai:

- Camat Benjeng: Nurul Fuad
- Kapolsek Benjeng: AKP Darmawan

Seperti terlihat dalam foto, salah satu kontingen yang paling menyita perhatian adalah rombongan dengan kostum adat merah menyala bernuansa Ulos dan budaya Nusantara. Mulai dari anak-anak hingga dewasa tampil totalitas dengan mahkota adat, kain songket,



dan perhiasan emas yang berkilauan. Seorang anak kecil dengan mahkota emas di barisan depan menjadi ikon menggemaskan yang banyak diabadikan warga.

Di belakangnya, iring-iringan sound system horeg dengan lighting yang kemarin malam sudah cek sound, turut mengiringi peserta karnaval dengan dentuman musik yang membuat suasana semakin hidup.

Kepala Desa Bulu Rejo, Imam Sofwan, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi seluruh warga.

"Alhamdulillah, Karnaval tahun ini sangat meriah. Ini bukan sekadar pesta, tapi wujud syukur kita, wujud kebersamaan dan gotong royong warga Bulu Rejo. Terima kasih kepada seluruh RT/RW, karang taruna, dan Forkopimcam Benjeng yang telah hadir dan mendukung. Semoga Bulu Rejo semakin maju, rukun, dan sejahtera," ungkap Imam Sofwan.

Sementara itu, Camat Benjeng, Nurul Fuad, mengapresiasi kekompakan warga Bulu Rejo yang mampu menjaga tradisi karnaval sebagai agenda budaya yang positif.

Hingga petang, acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan dari Polsek dan Koramil Benjeng.

Warga yang menonton pun terlihat sangat antusias, duduk berjejer di pinggir jalan sambil membawa keluarga.

■ **Suwandi**